

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan yang terletak di Jakarta Selatan, sebagai perwujudan kekayaan budaya Betawi, mengalami proses revitalisasi dimulai beberapa tahun yang lalu. Langkah-langkah kebijakan tersebut mencakup transformasi fisik, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan kebijakan lainnya yang berpotensi membentuk kembali wajah dan karakter kawasan tersebut. Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan saat ini disorot sebagai bagian penting dari warisan budaya ibu kota. Sebagai destinasi yang kaya akan tradisi dan keunikan, Setu Babakan telah menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dan masyarakat yang peduli terhadap pelestarian budaya lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, kelestarian pariwisata budaya lokal kian menyusut.

Pariwisata budaya di Indonesia merupakan salah satu konversi budaya dan tradisi leluhur. Perkembangan cagar wisata budaya di Indonesia telah mencapai 1.119 cagar budaya dengan persebaran yang tidak merata. Selain itu cagar budaya lainnya sekitar 196 objek yang ditetapkan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Wisata budaya merupakan bentuk pemerintah pusat dengan daerah sebagai implementasi desentralisasi dan otonomi daerah. Usaha pemerintah daerah dalam mengelola dan memberikan peluang wisata di daerahnya diberikan seluasnya. Haryono (Razak & Suprihardjo, 2013:14) menyebutkan bahwa pariwisata sebagai kegiatan dimana individu melakukan kegiatan yang menghibur sehingga dapat melepaskan

kesibukan sehari-hari. Proses pengembangan pariwisata memerlukan aturan secara jelas dan wewenang penuh dari pemerintah pusat ke daerah. Pariwisata secara nyata dapat memberikan partisipasi dalam pendapatan negara, pembangunan, tingkat ekonomi dan kelestarian budaya setempat. Pemerintah dalam aksinya mengeluarkan kebijakan publik sebagai solusi. Kebijakan publik di Indonesia dibuat dalam bentuk aturan atau undang-undang.

Pemerintah lokal memanfaatkan wewenang ini dengan upaya pemberian pelayanan berupa ide kebijakan baru yang memberikan pembaharuan dalam pengelolaan pemerintah. Desentralisasi sangat berpengaruh terhadap pembangunan kota DKI Jakarta. Otonomi daerah memberikan manfaat pemerintah daerah DKI untuk mengembangkan baik ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata. Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa pemerintah daerah mempunyai kekuasaan untuk memelihara dan menjaga persoalan pemerintahan sesuai dengan asas dan tugas 'pendukung'. Pelimpahan kewenangan atau desentralisasi bertujuan untuk dapat memberikan inovasi perubahan agar menjamin kesejahteraan masyarakat melalui perubahan pelayanan yang berkualitas dengan partisipasi masyarakat (Nurhadi dkk., 2021). Jumlah kunjungan wisata memiliki pengaruh pada kelangsungan daerah tersebut.

Gambar 1. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di DKI Jakarta Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2020 dalam Rachmawati & Alhazami (2022)

Berdasarkan gambar 1.0 diatas bahwa kunjungan wisatawan pada tahun 2020 turun sangat cepat dikarenakan pandemic covid-19. Wisata yang menurun mengakibatkan menurunnya pendapatan negara. Wisata yang ada di perkotaan sering kali minim daya tarik. Sehingga pemerintah DKI Jakarta menggali potensi wisata melalui pelestarian budaya. Proses kebijakan yang dibuat sesuai dengan kondisi daerahnya yaitu desa atau kota. Kebijakan pengembangan pariwisata sering kali berbasis keindahan alam atau kuliner. Pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal belum sepenuhnya diperhatikan di daerah perkotaan. Secara nyata pemerintah lokal memanfaatkan pendekatan budaya sebagai cara pembangunan proyek kota. Kegiatan pariwisata ini menggunakan pendekatan budaya di DKI Jakarta adalah melestarikan budaya Betawi.

Sejak dahulu, Suku Betawi dapat dikatakan sebagai suku asli yang mendiami wilayah Jakarta dan sekitarnya. Namun, tidak ada konsensus yang jelas tentang jumlah suku Betawi yang ada saat ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah suku Betawi berkisar antara 2-3 juta orang, sementara yang lainnya

menyatakan bahwa hanya ada sekitar 1 juta orang suku Betawi yang tersisa. Namun, yang pasti adalah bahwa jumlah suku Betawi terus berkurang sejalan dengan kemajuan kota Jakarta serta transformasi budaya di masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk melestarikan kebudayaan Betawi dan menghargai warisan budaya yang dimiliki oleh suku Betawi.

Tabel 1. 1 Jumlah Suku Bangsa di Indonesia Tahun 2022

Suku	Jumlah
Jawa	95.000.000
Betawi	6.807.968
Sunda	36.701.670
Lainnya	750.142
Tionghoa	632.372
Batak	8.466.969
Minangkabau	6.462.713

Sumber: Badan Pusat Statistik Jumlah Suku di Indonesia, 2022 dalam Alifah (2022)

Perkembangan wisata budaya di DKI Jakarta terutama budaya Betawi kian terancam. Presentase komunitas Betawi di DKI Jakarta hingga saat ini hanya 2,8 % dari etnis pendatang. Artinya, jumlah komunitas Betawi tersingkir ke sekitar daerah DKI Jakarta. DKI Jakarta memiliki banyak potensi wisata budaya Betawi yang dapat dikembangkan. Salah satu cara untuk merevitalisasi wisata budaya di DKI Jakarta adalah dengan mengembangkan acara dan festival budaya yang

menampilkan keanekaragaman kultur di Jakarta. Acara dan festival ini dapat menarik wisatawan untuk datang dan mengalami budaya lokal. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur yang mendukung wisata budaya, seperti restorasi bangunan bersejarah dan pembangunan museum. Ini akan membantu melestarikan warisan budaya Jakarta dan membuatnya lebih mudah diakses oleh wisatawan.

Peran masyarakat setempat juga sangat penting dalam merevitalisasi wisata budaya di DKI Jakarta. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pengembangan dan promosi pariwisata, dan mendapatkan manfaat yang adil dari industri pariwisata. Dalam rangka merevitalisasi wisata budaya di DKI Jakarta, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku pariwisata. Dengan kolaborasi yang baik, wisata budaya di DKI dijadikan sebagai sumber penghasilan lain yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat dan meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya lokal melalui pendekatan pariwisata.

Pendekatan pariwisata melalui budaya merupakan cara yang efektif untuk mengembangkan industri pariwisata di suatu daerah. Dengan fokus pada budaya lokal pariwisata dapat dijadikan sumber pendapatan baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Salah satu keuntungan dari pendekatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap warisan budaya. Ini dapat mendorong masyarakat untuk melestarikan dan mempertahankan tradisi dan budaya Betawi.

McKercher & Du Cros (2002) berpendapat bahwa adanya peredaran wisata kebiasaan berhubungan erat dengan diciptakannya penghargaan dari umum untuk

secara terus memelihara dan merawat harta budaya atau aset kultur saat ini semakin terkikis. Pakar tersebut memberikan penjelasan dasar pariwisata budaya melalui empat elemen yaitu, wisata, wisatawan budaya sendiri, aset budaya serta hasil karya. Berdasarkan elemn ini maka dapat digunakan sebagai bentuk pengembangan pelayanan publik dapat dibentuk.

Pengembangan pariwisata di DKI Jakarta terutama budaya mulai menurun, akibat adanya globalisasi. Perkembangan teknologi menyebabkan proses kearifan dan kelestarian budaya mulai tergeser. Jakarta sebagai ibukota yang merupakan pusat perkembangan dan pembangunan menjadi tempat paling cepat masuknya budaya dari luar. Pengembangan wisata budaya di DKI Jakarta merupakan upaya pemerintah untuk mempertahankan ciri khas budaya Indonesia. Struktur geografis DKI Jakarta yang saat ini sudah menjadi perkotaan dan minim pusat wisata sehingga dialihkan melalui wisata budaya. Namun, jumlah kawasan wisata budaya di DKI Jakarta sangat minim, khususnya budaya Betawi. Berikut adalah jumlah pariwisata yang tercatat di DKI Jakarta:

Tabel 1. 2 Jumlah Kunjungan Wisatawan di DKI Jakarta Tahun 2022

Objek Wisata	2020	2021	2022
Taman Impian Jaya Ancol	2.351.961	3.248.408	13.012.020
TMII	1.123.542	889.993	1.057.316
Ragunan	633.963	784.639	6.551.846
Monumen Nasional	67.008	-	5.007.359
Museum Satria Mandala	3.183	28.700	-

Museum Sejarah Jakarta	153.223	32.950	12.256
Pelabuhan Sunda Kelapa	16.348	5.039.107	26.706.492

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, 2022 dalam Mahsa (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa kebanyakan pariwisata yang ada di DKI Jakarta bukan kawasan budaya. Taman hiburan menjadi pariwisata paling berpengaruh di DKI Jakarta. Sedangkan kawasan wisata budaya tidak termasuk dalam data. Seiring dengan perputaran era dan teknologi, tradisi Betawi yang berpusat di kota Jakarta, berkembang dan berdeformasi bagian dalam bidang kebudayaan, rumah adat, tradisi, tata krama istiadat, dan makanan tradisional. Atas dasar hal tercantum, bahwa dibutuhkan adanya pemeliharaan peradaban Betawi. Perkembangan zaman yang terus berjalan di sebuah daerah dapat membuat kemerosotan harga dan mutu. Pernyataan tercantum dipertegas melalui pemeriksaan, bahwasanya sejalan dengan perkembangan zaman mampu menjadikan sifat suatu daerah menurun dan tidak lagi orisinal.

Kawasan Budaya Betawi Setu Babakan ini merupakan salah satu cagar budaya Betawi sebagai ciri khas dari DKI Jakarta. Kawasan ini sudah ada sejak tahun 2000, memiliki luas area sebesar 289 ha. Kawasan budaya ini adalah bentuk pelestarian budaya Betawi.

Gambar 1. 2 Perluasan Daerah Setu Babakan



Sumber: (Cahyanti & Prayogi, 2023)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas bahwa perluasan daerah wisata budaya Setu babakan bertambah pada lokasi danau. Salah satu tujuan wisatawan yang berkunjung adalah untuk berwisata atau bertamasya. Ketika akan melakukan kegiatan wisata budaya penting bagi wisatawan untuk menjaga dan memelihara citra dan budaya, serta memelihara keaslian budaya setempat. Berdasarkan UU No.26 tahun 2007, No.4725 mengenai tata ruang bahwa kawasan wialayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya maka dapat menggunakan aset yang ada disekitar kawasan, dengan difungsikan sebagai kawasan lindung atau cagar baik budaya maupun wisata alami..

Berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Wilayah DKI Jakarta 2011-2030, Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dalam pengembangannya dibentuk menjadi wilayah wisata budaya sekaligus wisata alam

yang unggul dan berkesinambungan sehingga kegiatan yang ada dilaksanakan dengan tujuan untuk menaikkan daya tariknya. Ditinjau dari Perda Jakarta No. 3 tahun 2005 bahwasanya Setu Babakan telah dikukuhkan sebagai wilayah pelestarian budaya sekaligus wisata alami.

Dasar hukum dalam pengelolaan kawasan ini seperti Surat Keterangan Gubernur DKI Jakarta Nomor 92 tahun 2000, mengenai Penataan Lingkungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan yang ditetapkan sebagai Perkampungan khusus Budaya Betawi. Selain itu, dikuatkan dengan Peraturan Daerah mengenai cagar budaya yaitu, Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 01 tahun 2012 pasal 71 bahwa kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan merupakan Kawasan Khusus Warisan Budaya.

Kawasan ini dibentuk dalam perencanaan secara berkala atau rutin sebagai salah satu agenda rencana jangka panjang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.. Agenda ini langsung diawasi oleh Kepala Unit yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Berikut adalah kawasan wisata budaya Setu Babakan di Jakarta Selatan.

Gambar 1. 3 Area Kawasan Wisata Setu Babakan

(a)



(b)



(c)



(d)



Sumber: gambar diolah, 2023

Pada gambar 1.2 diatas menjelaskan area pada kawasan wisata Setu Babakan yang terdiri dari (a) Danau, (b) Museum, (c) Plaza Pertunjukan, dan (d) Suasana sekitar danau. Berdasarkan kondisi tersebut proses pelestarian tidak terlalu menarik wisatawan. Pengembangan masih sangat diperlukan dan pembenahan secara lebih tertata setelah dilakukan revitalisasi. Oleh karena itu, dalam melakukan perekrutan pegawai Perkampungan dilakukan seperti pola pegawai resmi atau Pegawai Negeri Sipil yang diawasi langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Namun, daya tarik dalam wisata budayanya semakin menurun, sehingga perlu adanya revitalisasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu pemeliharaan terhadap peradaban Budaya Betawi.

Perkembangan zaman dan berjalannya waktu menyebabkan suatu budaya dapat kehilangan kualitas, nilai atau memburuk karena berbagai faktor. Penegasan ini didukung oleh kajian bahwa, seiring berjalannya waktu, sejarah dapat memudar, hingga pada titik di mana sifat kawasan tidak lagi berperan penting atau desain fisiknya menurun.

Tabel 1. 3 Kondisi Pelestarian Budaya Betawi

Tahap 1	Tahap 2
<p>Foklor Betawi (Budiaman et.al. 000)</p>	<p>Kriteria Lanskap Budaya (Jane & Steve 1996)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahasa dan ungkapan tradisional 2. Puisi dan prosa 3. Nyanyian rakyat 4. Kepercayaan 5. Permainan dan hiburan 6. Drama Rakyat 7. Tari-tarian 8. Adat kebiasaan, upacara dan pesta-pesta 9. Arsitektur rakyat 10. Seni kerajinan tangan 11. Pakaian dan perhiasan 12. Obat-obatan 13. Makanan dan minuman 14. Alat musik, senjata dan Mainan 15. Bahasa Isyarat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai keunikan 2. Keterwakilan 3. Kontinuitas dari masa lalu hingga kini 4. Integritas bahan dan hubungan antar komponen 5. Interpretability 6. Asosiasi (dengan orang – orang penting, kelompok dan peristiwa) 7. Hubungan dan surasi dengan peristiwa 8. Mempunyai ekspresi landscape terbaik 9. Kegiatan dan asosiasi yang jelas 10. Usia 11. Simbol penting 12. Keragaman <i>landscape</i> yang terwakili

Sumber: (Rosmalia dkk., 2019)

Berdasarkan ciri budaya diatas bahwa perlu dilakukan lebih lanjut pelestarian budaya Betawi. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata

melalui revitalisasi sekiranya dapat menghambat pelestarian dengan memakan waktu yang cukup lama. Pada proses pengelolaan pihak Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan diperlukan evaluasi aspek pelayanan seperti, kebersihan, tata Kelola atau penataan, sarana dan prasarana yang masih belum terawatt dengan baik (Mulyadi & Tuzzahara Alkaf, 2020). Pelestarian budaya Betawi sampai saat ini kian menurun. Kondisi modernisasi mempengaruhi tingkat kelestarian budaya Betawi. Wisata budaya Betawi di DKI Jakarta dilestarikan melalui wisata alam dan komunitas Betawi. Hal ini menghadirkan konsep perubahan melalui revitalisasi, namun kenyataannya kawasan yang dilakukan revitalisasi tidak sepenuhnya mengenai budaya Betawi, melainkan percampuran dan dominan ke budaya-lain. Sehingga keasrian budaya Betawi tidak terlihat bahkan tetap menurun. Proses pelestarian budaya ini dapat dilakukan dengan mengkaji program yang dijalankan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai difusi inovasi kebijakan revitalisasi tempat wisata perlu dilakukan pengawasan dan tepat sasaran. Penelitian ini dimaksudkan menilai atau evaluasi hasil program revitalisasi terhadap kualitas pelayanan PBB Setu babakan. Efektifitas dan dampak yang signifikan akan adanya kebijakan revitalisasi dalam mereduksi penyimpangan dan mengembangkan wisata budaya di perkotaan. Sehingga dapat menghasilkan pemahaman dan pandangan mengenai kebijakan revitalisasi dan pengembangan wisata budaya secara nyata melestarikan warisan budaya tanah air terutama budaya Betawi asli DKI Jakarta.

Atas uraian diatas, tersebut yang melatarbelakangi penulis melangsungkan penelitian dengan sumber pertanyaan yaitu **“Bagaimana evaluasi atau penilaian terkait kebijakan revitalisasi rutin yang dilakukan pihak pengelola mampu mengembangkan wisata budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan?”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil evaluasi program kebijakan revitalisasi wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan?
2. Apa saja faktor penghambat program kebijakan revitalisasi dalam wisata budaya Setu Babakan terhadap pelestarian identitas budaya Betawi di DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan revitalisasi wisata budaya Setu Babakan di Jakarta Selatan dengan teori W. Dunn dan konsep revitalisasi.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi program revitalisasi wisata budaya Setu Babakan dalam pelestarian budaya Betawi di DKI Jakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi civitas akademika di Universitas Diponegoro maupun bagi seluruh elemen masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 **Kegunaan Teoritis**

- a. Menambah wawasan pengetahuan pada Ilmu Administrasi Publik dibidang evaluasi kebijakan publik.
- b. Mengembangkan pengetahuan dibidang evaluasi kebijakan publik terkait urgenitas pelaksanaan revitalisasi cagar budaya.

1.4.2 **Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menerapkan pengetahuan mengenai hasil Analisa melakukan evaluasi dan mengembangkan penalaran penulis dibidang evaluasi kebijakan publik.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk melihat dampak revitalisasi kawasan budaya Betawi melalui cagar pariwisata budaya. Hal ini dapat membantu mewujudkan pelestarian identitas budaya Betawi di DKI Jakarta dan optimalisasi kinerja kebijakan.

1.5 **Kerangka Teoritis**

1.5.1 **Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan beberapa jurnal dibawah ini bahwa penelitian yang dilakukan akan berpedoman pada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menemukan bahan dan celah yang belum dikaji atau diteliti lebih lanjut. Penelitian ini untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian

ini tidak memplagiasi penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa penjelasan penelitian terdahulu dan tabel yang terlampir sebagai berikut:

NO	PENELITI / TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	(Firdaus dkk., 2018)	Memberikan alternatif solusi dalam merevitalisasi kawasan Kota Tua	Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dan konsep TOD (<i>Transit Oriented Development</i>)	Menggunakan metode kualitatif melalui observasi dan wawancara.	Konsep TOD terbukti mampu mengatasi permasalahan di Kota Tua dengan menarik wisatawan. Beralih menggunakan transportasi massal.
2.	(Rosalinda dkk., 2019)	Melihat kondisi sosial pada PBB Setu Babakan oleh masyarakat Betawi, pemprov, dan kelompok yang ada di wilayah sekitar.	teori interaksi sosial dan manajemen perkotaan	Metode yang digunakan adalah intersubjektivitas dan epoche.	Zona pada perkampungan Setu Babakan ini sebagai hasil revitalisasi dan objektivasi.
3.	(Mursalim, 2020)	Mengetahui perkembangan seni tari topeng yang mulai pudar pada budaya Betawi dengan melakukan perbaikan pariwisata	Penelitian ini menggunakan teori kebudayaan dan <i>culture experience</i> dan <i>culture knowladge</i>	Metode kualitatif serta studi Pustaka dan oberservasi lapangan.	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kebudayaan tradisional Betawi mengalami pemudaran dan strategi yang di usung beberapa ahli adalah melakukan

					revitalisasi budaya Betawi melalui pariwisata.
4.	(Sugiarti dkk., 2019)	Memberikan hasil model revitalisasi dan pengoptimalan peran aset sejatah melalui edukasi dan rekreasi.	Menggunakan teori Revitaliasi Pariwisata dan Wisata Pusaka serta teori kebijakan	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melalui pengamatan, wawancara, simak dan diskusi kelompok.	Kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam melakukan penghidupan kembali dan pengoptimalan aset sejarah melalui edukasi dan hiburan di kawasan Saringan masih perlu di kaji dan terbatas. Partisipasi masyarakat yang,masih menurutn serta perawatan kawasan masih kurang baik.
5.	(Pradini dkk., 2021)	Mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Budaya Betawi	Penelitian ini menggunakan teori pariwisata dan partisipasi masyarakat serta partisipasi budaya	Menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan menggunakan analisis SWOT	Partisipasi dalam di Perkampungan budaya betawi adalah dalam bentuk partisipasi ikutan dimana partisipasi dari atas ke bawah, pasif, formal, tidak langsung, simbolis, manipulasi, partisipasi pseudo, partisipasi dalam implementasi dan

					pembagian manfaat, pilihan antara alternatif yang diajukan. Bentuk inisiasi masih dalam bentuk <i>top down</i> , atau diinisiasi dan distimulasi oleh Pemerintah.
6.	(Ihsan & Siregar, 2020)	Meneliti pengaruh revitalisasi produk wisata pada preferensi dan pengaruh terhadap keputusan berkunjung suatu kawasan wisata terhadap cultural heritage.	Penelitian ini menggunakan teori revitalisasi wisata, pembangunan dan infrastruktur	Metode studi literatur secara kuantitatif dengan pengumpulan data melalui pengamatan langsung.	Menghadirkan bukti bahwa pulihnya produk pariwisata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap preferensi wisatawan terhadap destinasi wisata Danau Sipin Jambi.
7.	(Setiawati, 2019)	Melihat proses suatu revitalisasi serta hambatan dan kemudahan kegiatan revitalisasi di Situ Rawa Besar, Depok.	Penelitian ini menggunakan teori pariwisata, revitalisasi	Metode kualitatif dengan pengumpulan data secara wawancara dan observasi.	Kendala pengembangan wisata bahari di Rawa Besar antara lain adanya peternakan ikan yang kurang terorganisir dan ramah lingkungan, sehingga pada akhirnya mencemari sumber daya air Rawa Bening. Riset kebangkitan tidak

					ditanggapi serius oleh pemerintah Depok.
8.	(Mahindra & Megawati, 2022)	Mengidentifikasi implementasi kebijakan revitalisasi kawasan cagar budaya di Panggung Kota Lama, Surabaya	Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan revitalisasi	Metodenya yaitu kualitatif secara deskriptif dengan pengumpulan data, wawancara, dokumentasi dan observasi.	Ketepatan kebijakan dalam melestarikan cagar budaya cukup optimal, ketepatan pelaksanaan secara teknis masih jauh dari kata sepakat karena belum ada konsensus dengan para penggiat sejarah, ketepatan pelaksanaan dari segi teknik masih jauh dari optimal. Masih jauh dari optimal, karena beberapa narasumber menyatakan tidak setuju, presisi terhadap lingkungan hidup masih jauh dari optimal karena persepsi lembaga-lembaga strategis, khususnya komunitas penggiat sejarah.
9.	(Tauhid dkk., 2020)	Mengetahui hasil revitalisasi pada pengembangan pariwisata dalam menghadapi Covid-19.	Menggunakan teori kebijakan revitalisasi, Implementasi kebijakan	Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan merujuk model interaktifkoleksi data	Hal ini menunjukkan bahwa setelah mengidentifikasi destinasi wisata, Dinas Pariwisata Kota Bima perlu melakukan konsolidasi kegiatan atraksi wisata

					<p>pasca pemulihan untuk model pengembangan yang lebih tepat sasaran, antara lain: 1) Klaster Wisata Pantai, 2). Kelompok Perjalanan Rekreasi dan 3). Kelompok wisata alam.</p>
10.	(Kim & Kim, 2021)	<p>Mengevaluasi secara kuantitatif apakah daerah yang memiliki zona wisata mengalami peningkatan pengunjung yang signifikan dengan menggunakan <i>quasi-experimental pretest-posttest control group design</i>.</p>	<p>Menggunakan teori evaluasi kebijakan dan kebudayaan pariwisata</p>	<p>Menggunakan metode kuantitatif</p>	<p>Menunjukkan bahwa zona wisata yang terdiri dari wilayah sempit di prefektur yang sama mengalami peningkatan pengunjung yang signifikan. implikasi pada kebijakan pariwisata, pengembangan kota dan wilayah, dan pengembangan masyarakat dapat diperoleh melalui studi ini.</p>
11.	(Kelfaoui dkk., 2021)	<p>Berfokus pada perencanaan dan revitalisasi wisata pedesaan pegunungan untuk menghasilkan pendapatan bagi banyak masyarakat pedesaan. Ini menargetkan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pariwisata, revitalisasi dan pengembangan pariwisata</p>	<p>Menggunakan metode studi literatur dengan pengumpulan data secara survei, wawancara dan</p>	<p>Hasil penelitian mengidentifikasi delapan segmen yang menarik wisatawan dan lima segmen yang diminta penduduk desa. Terakhir, dalam</p>

		komunitas Great Kabylie di jantung Djurdjura massif di bagian timur provinsi Tizi-Ouzou di Aljazair.			pendekatan konseptual, kami membahas dampak pasar ini terhadap struktur kawasan pedesaan dan mengusulkan beberapa ide untuk mengatasinya. Alhasil, melalui promosi yang terus menerus, Yakouren bisa mendapatkan keuntungan dari peningkatan lalu lintas turis. Wisata pedesaan di komunitas pegunungan ini bisa menjadi sumber pendapatan yang penting, tetapi membutuhkan investasi.
12.	(Chang dkk., 2023)	Meningkatkan pengembangan warisan budaya takbenda dan mengubah sumber daya budaya menjadi sumber daya pariwisata sambil bekerja sama dengan kebijakan nasional untuk mengintegrasikan budaya dan pariwisata.	Penelitian ini menggunakan teori Warisan Budaya, Inovasi dan kebijakan publik	Menggunakan metode kuantitatif dan <i>GIS Spatial Tecnology</i>	Sumber daya IHC Hunan secara keseluruhan dikumpulkan secara spasial dan sebagian besar terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi terpadu Hunan tengah-timur dan selatan dan daerah-daerah berpenduduk minoritas di wilayah barat. (2) Atraksi

					wisata mendorong sumber daya ICH dengan karakteristik suboptimal, artinya ada hubungan yang unggul antara distribusi spasial tempat pemandangan 4A dan sumber daya ICH.
13.	(Chen, 2022)	Pahami pentingnya "revitalisasi pedesaan" untuk pembangunan sosial Tiongkok, jelajahi strategi "revitalisasi pedesaan" desa-desa pesisir, analisis peran "revitalisasi pedesaan" olahraga rekreasi laut dan industri pariwisata budaya dalam pengembangan desa-desa pesisir.	Penelitian ini menggunakan teori Revitalisasi Pedesaan dan Pengembangan pariwisata	Menggunakan metode studi literatur dan observasi langsung ke masyarakat	Perkembangan industri pariwisata budaya olahraga rekreasi laut, aktivitas sosial dan psikologis pariwisata dan wisatawan telah berubah secara signifikan. Analisis simulasi digunakan untuk memprediksi perkembangan desa pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menentukan jalur pengembangan, budaya olahraga rekreasi desa-desa pascapantai dapat terkoordinasi dan perekonomian pedesaan

					dapat meningkat secara signifikan.
14.	(Kuzior dkk., 2022)	Mengidentifikasi pelanggan potensial dan menentukan metode yang paling efektif untuk mempromosikan objek budaya pasca-industri dan pariwisata pasca-industri. pengembangan pariwisata pasca-industri dan revitalisasi fasilitas pasca-industri dari perspektif baru pengguna potensial.	Penelitian ini menggunakan teori Revitalisasi, dan Pariwisata pasca industri	Menggunakan metode studi komparatif dengan pendekatan kualitatif	Implikasi praktis dari penelitian diagnostik termasuk bagaimana menentukan kelompok sasaran dan saluran transmisi informasi apa yang terbaik untuk menarik minat wisatawan ke wisatawan pasca-industri. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh otoritas pengelola monumen budaya pasca-industri sebagai pedoman untuk merancang kegiatan pemasaran dan segmentasi pasar untuk layanan pariwisata pasca-industri, yang memungkinkan mereka menjangkau kelompok sasaran yang ditentukan secara lebih efektif.

15.	(Ahmed dkk., 2020)	Mengidentifikasi efek mediasi pemikiran strategis antara six sigma dan kinerja operasional perusahaan pariwisata di Irak.	Penelitian ini berdasarkan teori pariwisata, manajemen, infrastruktur dan budaya	Menggunakan metode kuantitatif	Membuktikan bahwa menerapkan Six Sigma dengan pemikiran strategis akan menghasilkan peningkatan keinginan pelanggan, peningkatan kualitas produk dan layanan dengan meningkatkan kinerja operasional.
16.	(Liu dkk., 2022)	Mengusulkan kerangka teoritis untuk penelitian revitalisasi pedesaan dan membangun sistem evaluasi indeks untuk evaluasi efektivitas implementasi revitalisasi pedesaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari dua perspektif: kehidupan material dan kehidupan spiritual.	Penelitian ini dengan landasan teori <i>rural revitalization</i> , dan Evaluasi	Menggunakan metode kuantitatif	Perbedaan efektifitas implementasi strategi revitalisasi pedesaan di wilayah studi ditemukan perbedaan; terutama di daerah-daerah yang memiliki karakteristik budaya pedesaan yang jelas, tingkat penerapannya relatif tinggi. Efektivitas pelaksanaan strategi revitalisasi desa merupakan hasil dari interaksi multi-faktor. Tingkat penghijauan desa, kemampuan inovasi, dan usia pendukung desa adalah faktor utama yang mempengaruhi revitalisasi

					desa, dan efek interaksi kemampuan inovasi desa dan faktor lainnya signifikan.
17.	(Ekomadyo, 2019)	Melihat ilmu dari dua pasar rakyat yang berhasil direvitalisasi dengan mengevaluasi perannya sebagai tempat ekonomi dan sosial budaya dan dievaluasi hasil revitalisasi.	Penelitian ini dengan landasan teori revitalisasi, revitalisasi pasar dan sosial budaya	Metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data secara observasi serta wawancara	Dengan mengevaluasi pasar yang berhasil direvitalisasi ini, aspek-aspek penentu yang akan diterapkan sebagian besar dapat dilacak. Tetapi juga telah dikemukakan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dapat dipilih dengan berbagai cara tergantung pada karakter masyarakat lokal dan pilihan politik masing-masing kotamadya. Surakarta dan Bandung memiliki karakter sosial yang berbeda, sehingga mereka menggunakan pendekatan pelibatan pemangku kepentingan yang berbeda dalam revitalisasi pasar rakyatnya.

18.	(Wu, 2021)	Mengetahui evaluasi tentang budaya kelautan hasil dari revitalisasi kawasan wisata yang ada di Shanghai	Penelitian ini dengan landasan teori sumber daya kelautan, pengembangan budaya, dan revitalisasi wisata	Menggunakan metode studi literatur secara kualitatif	Sumber daya budaya laut menempati posisi dan peran yang sangat penting dalam industri budaya Distrik Jinshan. Saat ini, seluruh pelosok tanah air giat mengembangkan wisata budaya dan menciptakan produk wisata budaya.
19.	(Ying, 2020)	Berdasarkan situasi pengembangan sumber daya pariwisata Guangdong saat ini dan analisis data evaluasi pariwisata OTA, mempelajari masalah pengembangan sumber daya pariwisata, dan menerapkan keseluruhan perencanaan dan pemikiran sistematis pariwisata pedesaan dengan puncak implementasi pengentasan dan integrasi kemiskinan pariwisata pesisiri.	Penelitian ini dengan landasan teori Pengembangan pariwisata, Revitalisasi dan integrasi	Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis survei	Industri pariwisata mencakup enam elemen utama: "makanan, perumahan, perjalanan, pariwisata, belanja, hiburan". Proyek harus menggali jauh ke dalam layanan pendukung pariwisata seperti makanan, perumahan, belanja, dll., dan memainkan peran utama dalam industri pariwisata. Berbasis industri primer dan sekunder yang asli Memperpanjang mata rantai industri dan meningkatkan nilai tambah industri pariwisata.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memaparkan empat penelitian yang relevan dan sebagai awal untuk melanjutkan penelitian yang akan di kaji. Referensi penelitian pertama ialah kajian yang di teliti oleh Rosalinda dkk. (2019) yang berjudul *Konstruksi Sosial Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Dalam Kehidupan Sehari-Hari* menjelaskan bahwa komunitas Betawi di DKI Jakarta memudar dan bergeser ke pinggir kota, sehingga pemerintah membentuk perkampungan betawi berbasis cagar budaya. Proses perkembangan budaya yang di gunakan dengan cara partisipasi masyarakat membentuk gigi balang sebagai khas suku Betawi.

Pada referensi penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2019) dengan judul *Program Revitalisasi Situ Rawa Besar Sebagai Daya Tarik Wisata Air di Kota Depok* menghasilkan penelitian bahwa pengembangan wisata di Kota Depok masih kurang terkonsep, selain itu kebijakan merevitalisasi tidak sepenuhnya berjalan lancar pada Situ rawa Besar dikarenakan pasca revitalisasi yang tidak dirawat dan tidak disertakan partisipasi masyarakat.

Selain itu berikut ialah penelitian yang dilakukan oleh Mahindra & Megawati (2022) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya (Studi Pada Jalan Panggung Kota Lama, Surabaya)* membuktikan bahwa kebijakan revitalisasi yang dilakukan Kota Lama, Surabaya berhasil dengan metode yang terkonsep. Bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan revitalisasi mampu secara optimal meningkatkan daya tarik wisata dan melestarikan budaya lokal maupun peninggalan bersejarah.

Referensi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kim & Kim (2021) yang berjudul *Tourism as a Key for Regional Revitalization?: A Quantitative Evaluation of Tourism Zone Development in Japan* membuktikan bahwa teori revitalisasi budaya dapat dianggap sebagai kunci perbaharuan budaya lokal. Penelitian yang didasarkan pada kebudayaan di Jepang secara optimal dilakukan dengan revitalisasi cagar budaya melalui pembagian zona atau *Tourism Zone Development*. Selain itu kebijakan evaluasi sebagai landasan pelestarian budaya di Jepang dilakukan secara terus menerus dan efisien menjaga ciri dan citra kebudayaan asli. Dalam penelitian ini sangat di tekankan bahwa evaluasi terhadap suatu kebijakan sangat penting dan berpengaruh pada keputusan kebijakan selanjutnya.

1.5.2 **Administrasi Publik**

David H. Rosenbloom Pasolong (2011:13) mengartikan administrasi publik sebagai pemenuhan dari kebutuhan pemerintah bidang legislatif dalam melakukan manfaat teori – teori dan proses manajemen, politik dan hukum sebagai fungsi pemenuhan pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, bahwasanya administrasi publik adalah suatu kerjasama dua orang atau lebih dalam usaha – usaha pelaksanaan kebijakan pemerintah seperti formulasi, implementasi dan mengelola (*manage*) keputusan – keputusan yang telah ditetapkan oleh badan – badan perwakilan politik atau legislatif untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan administrasi publik sendiri meliputi

implementasi kebijakan, koordinasi kebijakan, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan Ilmu administrasi publik sendiri sangat erat hubungannya dengan ilmu politik.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Keenam model administrasi publik tersebut dijelaskan sebagai berikut.

A. Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Pada Paradigma 1 tahun (1900-1926) atau yang lebih dikenal dengan paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh dalam paradigma ini diantaranya Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow hal ini berdasarkan karya mereka yang berjudul "*Politics and Participation*". Berdasarkan karyanya tersebut dijelaskan bahwa suatu politik harus memiliki fokus pada kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat administrasi dengan mengimplementasikan kebijakan yang dibuat. Penggolongan politik dan administrasi dalam pemerintahan seperti badan legislatif bertujuan menyalurkan kehendak masyarakat, badan eksekutif yang menjalankan kehendak serta badan yudikatif yang menyokong badan legislatif dalam membuat kebijakan yang sesuai rancangan. Pada paradigma ini melihat sisi pandang administrasi publik dengan nilai yang bebas dan terarah kepada tujuan akan efisiensi dari *government bureaucracy*. Paradigma ini memiliki kendala yaitu berfokus pada aspek lokus yaitu birokrasi pemerintah sehingga metode yang digunakan tidak terpaparkan secara terperinci.

B. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi dengan tokoh yaitu Wiloughby Gullick dan Urwick. Prinsip administrasi yang di tuangkan adalah POSDCORB yang bersifat umum atau universal. Perbedaan antara paradigma ini adalah fokus dan lokus pada administrasi publik. Paradigma ini memaparkan fokus administrasi publik yang merupakan fungsi serta prinsip manajemen, akan tetapi pemaparan lokus tidak secara rinci sehingga paradigma ini seakan dinyatakan secara umum fokusnya. Paradigma ini menekankan nilai fokus daripada nilai lokus.

C. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pada paradigma 3 ini tahun (1950-1970) adalah Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik dengan tokoh Morstein-Mark yaitu seorang editor buku berjudul “Elements of Public Administration” tahun 1946. Akibat adanya perbedaan pandangan ini menjadikan perubahan pada teori administrasi publik. Akhirnya, menciptakan teori administrasi publik yang dikemukakan John Gaus. Pada paradigma ini disimpulkan bahwa administrasi publik dengan politik, terlihat pada fokus administrasi publik yang abstrak karena imbasnya dari dominannya disiplin politik dengan prinsip administrasi.

D. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Publik (1956-1970)

Pada paradigma ke 4 tahun (1956-1970) adalah Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, prinsip ini mengembangkan prinsip yang pernah

populer sebelumnya. Fokus dalam paradigma ini mengarah pada perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem dan riset operasi.

E. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1970an)

Pada paradigma ke 5 tahun (1970 – sekarang) merupakan Administrasi Negara yang titik fokus dan lokusnya telah tergambar jelas. Fokus pada paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik sedangkan lokusnya berfokus pada masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik. Perbedaan paradigma dengan beberapa paradigma sebelumnya terletak pada kejelasan fokus dan lokusnya. Pada paradigma ini tercermin perubahan Administrasi Negara menjadi Administrasi Publik.

F. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik Baru atau Governance (1997)

Paradigma ke 6 tahun (1990-sekarang) yaitu paradigma *Governance*. Paradigma ini merupakan paradigma terbaru berdasarkan proses perkembangan ilmu administrasi publik yang tersusun atas serangkaian yang telah ditemukan. Dengan adanya pergantian dari *government* ke arah *governance* yang merincikan perihal perpaduan di dalam stabilitas pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), sehingga arah perkembangan paradigma ini menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun pada penelitian ini menggunakan paradigma administrasi publik yang ke-6 yaitu paradigma *governance* yang merupakan suatu pembaharuan dari paradigma sebelumnya. Dalam paradigma ini Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara bertahap akan mengubah sistem manajemen negara yang pada awalnya bersifat tertutup, tidak akuntabel menjadi sistem manajemen negara yang bersifat terbuka (transparan) dan akuntabel. Hal ini berkaitan dengan adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan pengembangan pelayanan publik dalam bidang wisata terutama untuk masyarakat kota. Hal ini sekaligus upaya pelestarian budaya asli daerah suatu tempat.

Lebih lanjut untuk mengatasi masalah pemerosotan budaya yang hampir punah terutama Budaya Betawi muncul sebuah gagasan untuk melakukan pengembangan dan pencegahan melalui kebijakan revitalisasi kawasan cagar budaya secara merata. Upaya ini juga termasuk dalam pengembangan pelayanan pemerintah kepada publik.

1.5.4 **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah suatu strategi, rencana dan rancangan atau alat untuk memberikan kebutuhan suatu masyarakat untuk mencapai kondisi yang dikehendakinya. Kebijakan publik ialah aturan yang dibentuk untuk kepentingan umum atau masyarakat. Meliputi kepentingan komersial dan kepentingan politik, individu, atau organisasi tertentu. Oleh karena itu, kebijakan harus menerapkan prinsip kerja sama dan empati terhadap

masyarakat, baik dari segi formal, kognitif dan nilai. Kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah yang tidak dapat di tarik kembali, sehingga harus direncanakan dengan sungguh-sungguh. Kebijakan publik pada awalnya dan akhirnya adalah mengenai Moralitas Pemerintah, bukan tentang masalah-masalah teknis penerapan kebijakan.

Woll yang dikutip Tangkilisan (2003:2), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah kegiatan pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk memahami posisi dan peran strategis pemerintah sebagai aktor publik, dalam kaitannya dengan kebijakan publik, perlu dipahami bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Di sisi lain, kebijakan publik dituntut untuk dapat beradaptasi dengan nilai-nilai kehidupan dan pembangunan di masyarakat.

1.5.5 **Evaluasi Kebijakan**

Menurut beberapa ahli, tahap evaluasi dianggap sebagai tahap penting untuk mengembangkan suatu kebijakan. William N. Dunn, memberikan pengertian istilah evaluasi sebagai berikut: “Secara umum istilah evaluasi dapat diumpamakan dengan mengevaluasi, memberi peringkat, dan mengevaluasi, yaitu kata yang mewakili suatu upaya untuk menganalisis hasil-hasil kebijakan dalam satuan nilai.

Menurut William Dunn terdapat kriteria melakukan evaluasi kebijakan adalah efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Evaluasi kebijakan dianggap sebagai kegiatan yang fungsional. Tujuan melakukan evaluasi adalah untuk membantu memahami tujuan kebijakan, cara penerapannya, dan jenis dampak yang dicapai. Terdapat tiga unsur yang harus dilakukan oleh evaluator dalam melakukan pelaksanaan evaluasi yaitu:

- a. Menjelaskan keluaran suatu kebijakan yang merupakan hasil kebijakan.
- b. Evaluasi berkaitan dengan kemampuan pembuat kebijakan menyelesaikan permasalahan sosial.
- c. Evaluasi berkaitan dengan konsekuensi antara bentuk reaksi dari tindakan pemerintah.

Teori evaluasi oleh William Dunn mengemukakan dalam analisis kebijakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain:

1. Evaluasi dapat memberikan informasi yang baik dan dapat diandalkan dalam pelaksanaan kebijakan berikutnya, khususnya sejauh mana kebutuhan, nilai, peluang dan tujuan dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini penilaian menunjukkan sejauh mana tercapainya tujuan dan sasaran tertentu dalam penyelesaian masalah.
2. Penilaian juga dapat memperjelas dan mengkritisi nilai suatu tujuan dan sasaran kebijakan publik. Nilai-nilai diperjelas dengan mengidentifikasi dan mengoperasionalkan tujuan dan sasaran. Dengan mempertanyakan

kelayakan tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan sumber nilai atau landasan alternatif berupa rasionalisme.

3. Dengan tinjauan ini dapat menerapkan analisis kebijakan sebagai rekomendasi perumusan dan pemecahan masalah. Evaluasi juga memberikan kontribusi untuk alternatif kebijakan baru yang perlu diganti atau di perbaharui.

1.5.6 Tipe-tipe Evaluasi

Tipe evaluasi dapat dikatakan sebagai cara efektif melakukan evaluasi suatu program atau kebijakan. Terdapat beberapa teori evaluasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh para pakar di bidang tersebut. Berikut adalah beberapa teori evaluasi kebijakan yang umum:

1. Model Evaluasi Linier: Model ini melibatkan empat tahap evaluasi yaitu penentuan kriteria evaluasi, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil evaluasi. Pendekatan ini berfokus pada pengukuran efektivitas kebijakan dengan menggunakan metode-metode kuantitatif dan kualitatif.
2. Pendekatan Utilitarian: Pendekatan ini mengasumsikan bahwa evaluasi kebijakan harus didasarkan pada kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya dari suatu kebijakan dan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan sosial.

3. Teori Sistem: Pendekatan ini melihat kebijakan sebagai sistem yang kompleks dan saling terkait. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan memahami interaksi dan dampak kebijakan terhadap berbagai komponen sistem. Teori ini menekankan pentingnya melihat dampak kebijakan secara holistik.
4. Pendekatan Responsif: Pendekatan ini menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengevaluasi respons kebijakan terhadap masalah atau kebutuhan yang ada. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana kebijakan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan sejauh mana kebijakan tersebut memberikan solusi yang memadai.
5. Teori Ekologi: Pendekatan ini melihat kebijakan sebagai evaluasi kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana kebijakan diimplementasikan. Teori ini menekankan pentingnya memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan.
6. Pendekatan Pengembangan Kapasitas: Pendekatan ini melihat evaluasi kebijakan sebagai proses yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan organisasi dalam mengelola kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pembelajaran, pemulihan, dan peningkatan kapasitas dalam mengimplementasikan kebijakan.

Perkembangan terbaru dalam teori evaluasi kebijakan mungkin telah terjadi, dan berdasarkan tipe diatas bahwa penelitian ini menggunakan tipe

pendekatan responsis dan pendekatan utilitarian. Oleh karena itu, diharapkan dapat melihat dampak kebijakan revitalisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan kebijakan.

1.5.7 **Kebijakan Revitalisasi**

Revitalisasi adalah proses regenerasi atau pengaktifan kembali. Kelahiran kembali secara harafiah berarti menyalan kembali sesuatu, artinya tidak hanya mencipta atau menghidupkan kembali apa yang telah ada sebelumnya, namun juga membenarkan struktur, mekanisme pengoperasian, dan adaptasinya. Proses pelaksanaan revitalisasi suatu kawasan meliputi perbaikan aspek fisik, ekonomi, dan sosial.

Pembangunan ulang dapat dikatakan sebagai pembaharuan atau penyegaran, menggiatkan kembali. Revitalisasi secara harfiah berarti arti yang mencipta kembali atau menghidupkan kembali apa yang telah ada sebelumnya, namun juga menyempurnakan struktur, mekanisme pengoperasian, dan adaptasinya dengan kondisi yang baru. Berdasarkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Rehabilitasi Daerah. Regenerasi merupakan upaya peningkatan nilai suatu lahan/kawasan melalui pembangunan kembali suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Revitalisasi sendiri dapat dikatakan bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik tetapi harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi dan pengenalan budaya. Revitalisasi merupakan sebagai sebuah kegiatan kompleks.

a. Intervensi Fisik

Citra sebuah kawasan berkaitan dengan visual atau kondisi fisik dalam menarik pengunjung atau wisatawan, maka analisis ini sangat diperlukan.

b. Rehabilitasi Ekonomi

Perbaikan fisik akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi secara formal maupun informal sehingga memberikan nilai tambah pada kawasan tersebut.

c. Revitalisasi Sosial

Kegiatan revitalisasi akan berhasil apabila menciptakan suasana baru dan menarik, jadi tidak hanya membuat cantik tetapi berdampak positif pada kehidupan sosial masyarakat sekitar.

1.5.8 Cultural Heritage

Cultural heritage disebut juga cagar budaya, Menurut UNESCO, warisan budaya meliputi warisan budaya yang berwujud (*Tangible Cultural Heritage*) dan warisan budaya yang tidak berwujud (*Intangible Cultural Heritage*). Warisan budaya benda nyata dapat berupa: 1) warisan budaya bergerak (lukisan, patung, uang logam, naskah kuno), 2) real estat warisan budaya (monumen, situs arkeologi), 3) warisan budaya bawah air (bangkai kapal, situs dan monumen bawah air). Adapun warisan budaya tak benda meliputi tradisi lisan, seni pertunjukan, dan ritual. Menurut Konvensi Warisan

Budaya UNESCO tahun 2003, warisan budaya mengacu pada jenis praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan yang diakui dan diakui oleh berbagai komunitas dan kelompok, dan dalam beberapa kasus merupakan bagian dari warisan budaya.

Dalam kaitannya dengan warisan budaya, istilah warisan budaya mengacu pada ciri khas dan nilai estetika, sejarah, sosial, spiritual atau lainnya dari suatu tempat, benda atau adat istiadat yang dapat dilestarikan untuk generasi seterusnya.

1.5.9 **Revitalisasi Wisata Budaya**

Revitalisasi wisata budaya adalah proses pemulihan dan pengembangan ulang destinasi wisata yang berfokus pada kekayaan budaya dan warisan tradisional suatu daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, apresiasi, dan pelestarian budaya, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi komunitas setempat. Berikut langkah dalam revitalisasi wisata budaya:

1. **Identifikasi dan Pelestarian Warisan Budaya:** Langkah pertama adalah mengidentifikasi aset budaya yang ada di suatu daerah dan melindunginya. Ini dapat mencakup situs arkeologi, monumen bersejarah, tradisi budaya, tari, musik, kerajinan, atau kuliner khas. Pelestarian warisan budaya yang baik adalah dasar penting untuk revitalisasi wisata budaya.
2. **Penyusunan Rencana Pengelolaan:** Pembuatan rencana pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan sangat penting. Rencana ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti pemeliharaan situs, pengembangan

infrastruktur, promosi, regulasi, dan partisipasi masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman wisata yang menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Melibatkan dan memberdayakan komunitas lokal sangat penting dalam revitalisasi wisata budaya. Komunitas harus terlibat dalam pengambilan keputusan, pelatihan, pengembangan keterampilan, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Ini akan meningkatkan ikatan antara wisatawan dan komunitas setempat serta memperkaya pengalaman wisata budaya.
4. Pendidikan dan Kesadaran Budaya: Pendidikan dan kesadaran budaya adalah elemen penting dalam revitalisasi wisata budaya. Masyarakat setempat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya melestarikan budaya mereka, menghargai warisan mereka, dan berbagi pengetahuan mereka dengan wisatawan. Program pendidikan, pelatihan, dan kegiatan kesadaran budaya dapat diadakan untuk mencapai tujuan ini.
5. Pengembangan Produk dan Pengalaman Wisata: Pengembangan hasil dan pengalaman pariwisata khas dan otentik merupakan hal yang penting dalam revitalisasi wisata budaya. Ini dapat meliputi tur budaya, festival tradisional, pertunjukan seni, kelas kerajinan, atau pengalaman kuliner. Memperkaya penawaran wisata dengan elemen budaya akan menarik lebih banyak wisatawan yang tertarik pada pengalaman yang berbeda.
6. Pemasaran dan Promosi: Upaya pemasaran dan promosi yang tepat harus dilakukan untuk memperkenalkan destinasi wisata budaya kepada khalayak

yang lebih luas. Ini dapat melibatkan strategi digital, kolaborasi dengan agen perjalanan, partisipasi dalam pameran pariwisata, atau kemitraan dengan media lokal maupun internasional. Promosi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan minat terhadap wisata budaya.

CRM (*Cultural Resource Management*) adalah usaha pengelolaan sumber daya budaya yang memperhatikan keberagaman menguntungkan banyak pihak, guna menghindari bentrokan. Kegiatan restorasi tidak hanya bertujuan oleh pergerakan fisik bangunan tetapi juga mencakup lanskap sebagai bagian integral dari bangunan, dengan tujuan tidak hanya untuk melindungi dan memelihara bangunan konservasinya tetapi juga mengembangkan dan memanfaatkannya.

Kegiatan restorasi cagar budaya tidak hanya bertujuan pada pergerakan fisik bangunan tetapi juga mencakup lanskap sebagai bagian integral dari bangunan, dengan tujuan tidak hanya untuk melindungi dan memelihara bangunan konservasinya tetapi terhadap mengembangkan dan memanfaatkannya. wisata.

1.5.10 Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dan penghambat inovasi Revitalisasi Kawasan Budaya Setu Babakan dapat dilihat melalui faktor-faktor yang mendukung:

1. Adanya keinginan dari *stakeholders* yang berkaitan untuk memperbaiki kawasan wisata budaya
2. Sesuai dengan peraturan pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi yang secara teknis

diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi

3. Adanya keinginan masyarakat asli DKI Jakarta untuk melestarikan Budaya Betawi yang hampir punah
4. Dukungan pemerintah kota melalui Peraturan Gubernur
5. Kondisi lingkungan yang masih banyak penduduk asli Suku Betawi
6. Kondisi lapangan kawasan Setu Babakan yang kurang terawat dapat dijadikan acuan evaluasi revitalisasi

1.5.11 Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat dapat dilihat melalui :

1. Kondisi lingkungan yang dipengaruhi budaya lain selain budaya Betawi
2. Proses pelaksanaan yang sering tertunda
3. Tidak adanya keterbukaan informasi hasil revitalisasi
4. Ketidakmampuan untuk mengikat perkumpulan dan jumlah populasi Suku Betawi secara keseluruhan
5. Budaya Betawi di DKI Jakarta yang mulai pudar

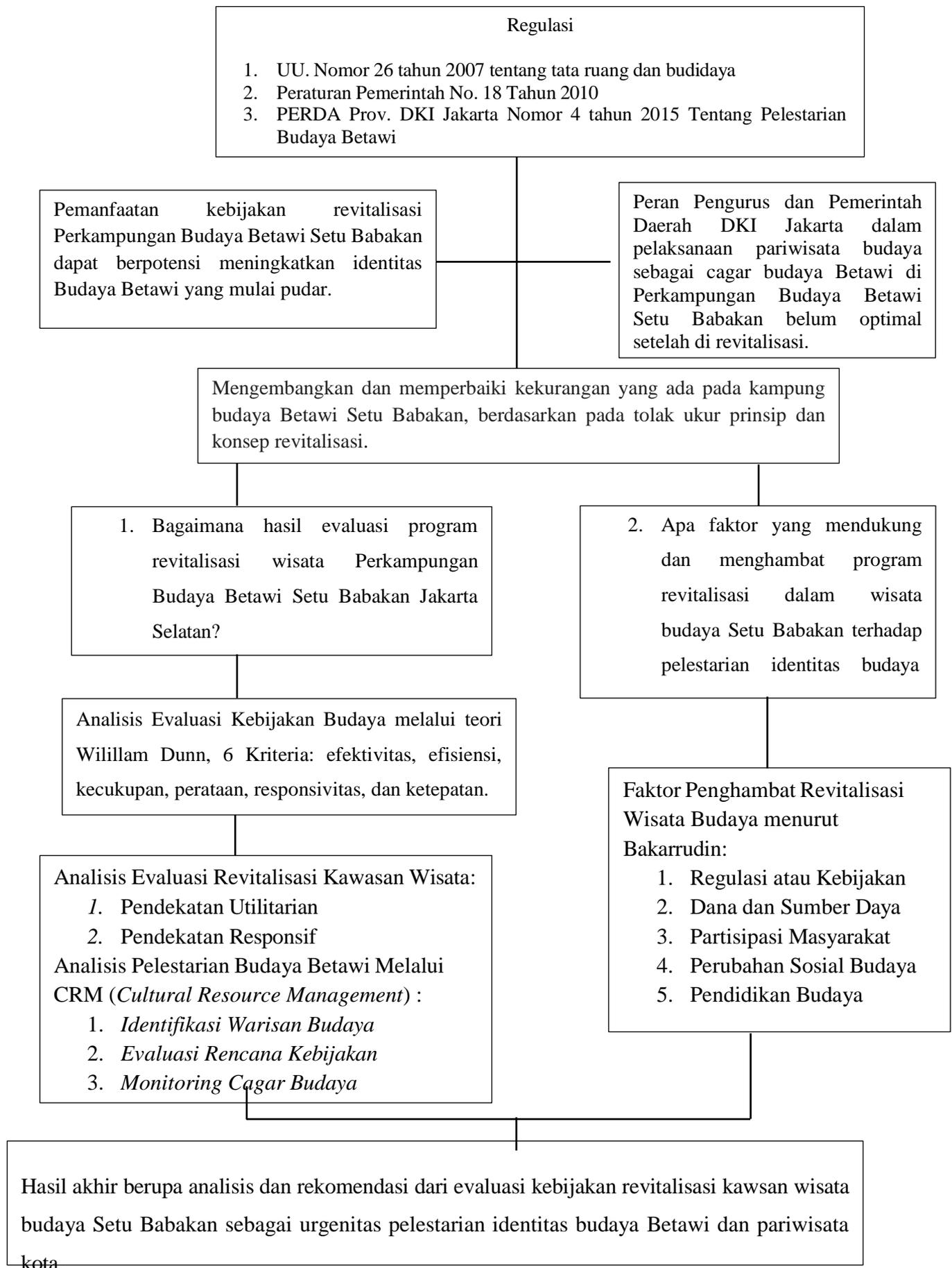
1.6 Argumen Penelitian

Revitalisasi tempat wisata sejatinya merupakan proses pemulihan suatu objek wisata yang belum secara optimal. Revitalisasi bertujuan secara khusus tidak hanya

untuk pembangunan atau perbaikan bangunan maupun sarana prasarana objek wisata namun, berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, *place branding*, perawatan, berdaya saing mampu mempertahankan kondisi alam maupun budaya yang di jadikan wisata dan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui UMKM serta cagar budaya. Program revitalisasi pada cagar budaya setu babakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi bahwa pemerintah berhak melakukan perbaikan cagar budaya Betawi. Kampung Budaya Betawi merupakan program pengembangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Program Khusus Gubernur) yang bertujuan untuk melaksanakan amanat UUD 1945 (Pasal 18 ayat 2 b) dan UU No.11/2015/TT-B. 29 Tahun 2007, Bab V, Pasal 26 ayat 6 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan masyarakat Betawi serta melindungi berbagai kebudayaan masyarakat daerah lain yang ada di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Alasan Setu Babakan dijadikan sebagai Perkampungan Budaya Betawi dikarenakan lokasi yang strategis dan sentra budaya yang kental. Sebelumnya, Condet yang ditetapkan sebagai Perkampungan Betawi dipindahkan akibat pembangunan modern dan budaya Betawi yang mulai kepinggir. Dalam pelaksanaannya Revitalisasi cukup memakan waktu lama selama 3 tahun. Hal ini berakibat pada menurunnya identitas tradisi dan budaya di lingkungan sekitar. Dengan semakin terkenalnya sebuah tradisi maka segenap lapisan masyarakat dari berbagai kawasan dapat mengenali tradisi tersebut sebagai salah satu identitas kawasan tertentu.

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Operasional Konsep

Evaluasi kebijakan revitalisasi wisata merupakan penilaian kebijakan revitalisasi yang dilakukan berkaitan dengan perubahan ulang pembangunan dan pengembangan wisata yang meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

1. Efektifitas, merupakan cara yang dikembangkan secara rinci dan jelas agar tercapai tujuan yang diinginkan. Adapun penjelasan fenomena ini yang dapat dilihat melalui hasil revitalisasi dari segi sarana prasarana, perawatan wilayah, dan layanan wisata cagar budaya Betawi.
2. Efisiensi. merupakan tingkat efektif dalam pelaksanaan secara hemat atau bermanfaat tingkat kegunaannya. Fenomena yang diamati adalah pelaksanaan revitalisasi yang dilakukan hingga lima tahun, berakibat pada menurunnya daya tarik dan identitas budaya Betawi di DKI Jakarta. Melihat kondisi lapangan wisata yang belum menarik.
3. Kecukupan, merupakan aspek yang didefinisikan sebagai tingkat pemenuhan kebutuhan sudah maksimal dan secara prioritas. Fenomena yang diamati adalah sarana prasarana tidak mencapai kapasitas pemenuhan tempat wisata mulai dari tempat duduk, tempat konservasi budaya Betawi, tradisi Betawi dan kondisi jalan belum rata.
4. Perataan, merupakan aspek penilaian secara adil sesuai dengan fungsi dan tujuan, serta merata pada aspek yang dipengaruhi. Fenomena yang diamati adalah proses sosialisasi yang tidak maksimal mengenai cagar wisata, selain itu kondisi tempat istirahat wisatawan tidak disusun dan minim fasilitas.

5. Responsivitas, merupakan tanggapan atau pendapat atas penilaian kebijakan yang diterapkan pada suatu kebijakan. Fenomena yang diamati adalah kondisi masyarakat sekitar terhadap potensi cagar wisata budaya Setu Babakan, perkembangan kelestarian budaya Betawi yang mulai menurun.
6. Ketepatan, Dalam aspek ini untuk melakukan seleksi sejumlah alternatif kemungkinan yang dapat direkomendasikan. Fenomena yang diamati adalah melihat dampak lain yang tidak terduga dan secara positif maupun negatif terjadi, sehingga mampu memberikan rekomendasi kebijakan sehingga lebih dinamis dan bergerak sesuai tujuan kelestarian budaya.

Evaluasi kebijakan revitalisasi ini dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendukung melalui fenomena komunikasi, partisipasi masyarakat, sumberdaya, struktur birokrasi. Adapun penjelasan berdasarkan fenomena-fenomena sebagai berikut:
 - a. Komunikasi, merupakan kejelasan dan kelancaran transmisi informasi terkait proses kebijakan revitalisasi cagar budaya Betawi Setu Babakan oleh pembuatan kebijakan dengan melaksanakan dan masyarakat sekitar. Evaluasi kebijakan revitalisasi sebagai bentuk pengembangan dan penilaian melalui komunikasi dari tanggapan masyarakat sekitar dan pengunjung tempat wisata.
 - b. Sumberdaya, kecukupan sumber daya manusia yang bekerja di wilayah cagar budaya Betawi Setu Babakan mulai dari penjagaan danau, kebersihan tempat sekitar dan informasi atau *tour guide* untuk penjelasan tradisi budaya Betawi.

- c. Partisipasi Masyarakat, merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan revitalisasi yang sesuai dengan kepentingan publik. Evaluasi yang dilakukan akan meningkatkan penilaian cagar budaya Betawi dan menjadi pemicu perkembangan budaya Betawi di wilayah lain.
- d. Struktur Birokrasi, peningkatan efektifitas pada jam operasional cagar budaya, selain itu kejelasan proses revitalisasi mulai dari pelaksanaan kebijakan hingga cagar budaya di buka kembali.

1.9 Metode Penelitian

Pada metode penelitian adalah tahap-tahap peneliti untuk mendapatkan informasi berupa data yang berdasarkan hasil riset. Tujuan metode penelitian untuk memperoleh pengetahuan ataupun penemuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Metode penelitian dibagi menjadi dua yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas mengenai gambaran yang jelas. Metode kuantitatif lebih menekankan penggunaan data berupa angka dan proses penelitian pada hasil pengukuran yang objektif menggunakan analisis statistik.

1.9.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan peneliti dalam menemukan pengetahuan hasil penelitian pada waktu

tertentu (Mukhtar, 2013:10). Sejalan dengan jenis penelitian yaitu kualitatif ini, maka data yang didapatkan disajikan adalah dalam bentuk deskriptif, sehingga memudahkan peneliti dalam mengelola data dari hasil wawancara dan observasi untuk melihat secara langsung realita yang terjadi di lapangan.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian merupakan merupakan sebuah keputusan untuk menetapkan wilayah atau kawasan dilakukannya penelitian. Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini mengedepankan keaslian situasi atau fenomena penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan lokasi yang sebenarnya dan sangat menghindari manipulasi latar (*setting*) penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah Kawasan Cagar Budaya Setu Babakan, DKI Jakarta. Latar belakang peneliti memilih dikarenakan hasil revitalisasi kawasan yang sampai saat ini belum di buka untuk umum dan tidak berubah secara signifikan, selain itu mayoritas yang berada pada cagar tersebut justru dari budaya selain Betawi.

Sedangkan fokus penelitian yang dibahas adalah evaluasi terhadap kebijakan revitalisasi Kawasan Budaya Setu Babakan dengan melihat aspek pelestarian budaya Betawi yang hampir punah di DKI Jakarta. Sehingga menganalisis efektifitas kebijakan revitalisasi yang dilakukan dari segi kelestarian budaya, keberhasilan kebijakan dan rekomendasi.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subyek penelitian yang erat kaitan dengan keberjalanan dalam suatu penelitian. Penentuan subyek penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan mencari informan yang sesuai dengan permasalahan terkait pada topik penelitian. Menurut Creswell (2016), jenis penelitian kualitatif ini dalam penentuan subyek penelitiannya menggunakan *Purposeful Sampling* penyeleksian untuk menentukan informan yang hendak dijadikan subyek atau sampel penelitian. Adapun dalam penelitian ini subyek yang sesuai dengan kriteria penelitian:

1. Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan
2. Kepala Satuan Pelaksana Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan
3. Staff Pelaksana Pengelola Program Revitalisasi Kawasan Setu Babakan
4. Staff Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan
5. Pedagang Sekitar kawasan Perkampungan Budaya Setu Babakan
6. Pedagang Sekitar kawasan Perkampungan Budaya Setu Babakan
7. Masyarakat atau Pengunjung Kawasan Perkampungan Budaya Betawi
8. Masyarakat atau Pengunjung Kawasan Perkampungan Budaya Betawi

1.9.4 **Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui perantara atau dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder seringkali dapat berupa bukti sejarah, catatan atau laporan yang dikumpulkan dalam arsip (data dokumenter) (Indriantoro & Supomo, 1999).

Jenis data yang digunakan juga berupa teks, wawancara, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol yang dapat menggambarkan orang-orang dalam penelitian, tindakan-tindakan dalam penelitian serta fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung.

1.9.5 **Sumber Data**

Hardani dkk. (2020) dan Zuldafrial (2012) merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sementara menurut Sugiyono (2009) jika melihat dari sumber datanya, baik sumber primer maupun sumber sekunder dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data.

Sumber data utama yang dibutuhkan peneliti berasal dari informan pengunjung kawasan wisata dan pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pemulihan. Sedangkan sumber data sekunder berasal

dari catatan atau dokumen lain seperti tinjauan penelitian terdahulu atau artikel terkait yang dapat memberikan informasi kepada peneliti tentang penyelenggaraan pelayanan publik secara elektronik.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2009) juga menerangkan bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan secara natural dengan kondisi yang alamiah untuk memperoleh hasil senatural mungkin, menggunakan sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 4 teknik penelitian yang meliputi:

1. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2008) merupakan sebuah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik yang ingin peneliti ketahui secara mendalam melalui responden yang diberikan pertanyaan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan metode pengambilan data yang dilakukan dengan pertemuan antar 2 orang yaitu peneliti dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai suatu topik penelitian. Dalam penelitian ini digunakan wawancara semistruktur dimana pelaksanaannya

lebih bebas dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya serta ide-idenya terkait dengan pengembangan kawasan cagar budaya Setu Babakan agar lebih menarik. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan akan sangat membutuhkan pertanyaan-pertanyaan umum yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka, guna menimbulkan opini dan jawaban terbuka dari narasumber.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini, dimana dilakukan teknik wawancara secara langsung (*face to face interview*) bersama Kepala pengurus kawasan perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan mengenai keberlangsungan proses wisata dan pelestarian budaya Betawi.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2014) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dalam metode observasi ini memiliki beberapa jenis, berikut merupakan jenis observasi yang digunakan:

1. Observasi non Partisipan, dapat dikatakan non partisipan apabila observer tidak turut ikut ambil bagian kehidupan observer atau orang yang diamati.
2. Observasi sistematis (*Structured observation*), yang dilakukan dengan pengamatan menggunakan pedoman pengamatan.
3. Observasi eksperimental yang dilakukan dengan cara observer dimasukkan dalam suatu kondisi atau situasi tertentu.

Peneliti ingin mengetahui langsung mengenai bagaimana penerapan revitalisasi secara langsung dapat berpengaruh pada kelestarian dan menarik wisatawan. Dalam penelitian ini, observasi atau pengamatan dilakukan dengan menggunakan jenis observasi partisipan dan observasi sistematis. Dimana peneliti turut serta mengambil bagian dari pengamatan serta menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu pencatatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen ini dapat berbentuk gambar, tulisan dari seseorang yang pada umumnya diambil dengan disebut sebagai dokumentasi berjalan. Dokumentasi data yang didapatkan dalam wawancara dapat digabungkan menjadi sebuah data yang valid. Dalam penelitian ini dokumentasi akan dilakukan pada saat melakukan observasi dan wawancara di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana penulis melakukan pencarian data-data dan informasi melalui berbagai dokumen baik tulis, cetak, elektronik sebagai pendukung dalam proses penulisan artikel. Studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca informasi dari buku-buku penunjang yang memiliki kaitan teori dengan topik yang dibahas seperti yang terdapat pada jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber-sumber pada internet yang valid lainnya. Pada umumnya peneliti memperoleh

data yang berasal dari berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa, kemudian dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan.

Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan sampel. Metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan menentukan kriteria tertentu untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan suatu tahap mengorganisir data sesuai dengan pola, kategori, dan unit-unit deskriptif tertentu. Sementara interpretasi data merupakan proses memberi arti dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi data yang ada (Barnsley & Ellis, 1992).

Dalam analisis data secara kualitatif, hasil dari penelitian sangat ditentukan oleh jawaban para narasumber atau informan. Oleh karena itu, dalam penelitian tidak boleh dimulai dengan ide-ide dari peneliti sendiri dan mencoba mencocokkan dengan apa yang dikatakan oleh para informan, tetapi sebaliknya perlu dilakukan perbandingan jawaban-jawaban antar narasumber dan juga sumber-sumber penelitian terdahulu.

1.9.8 **Kualitas Data atau Validitas Data**

Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenaran data penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data lain atau berbagai paradigma triangulasi. Data yang telah valid atau kebenarannya telah dipastikan melalui metode triangulasi dapat memberikan keyakinan peneliti terhadap penelitiannya, sehingga tidak akan terjadi keraguan dalam penarikan kesimpulan. Guna memastikan keabsahannya, penelitian ini digunakan metode triangulasi sumber data..

Menurut Bodgan & Taylor (2002), triangulasi data dapat digambarkan sebagai penggunaan beberapa sumber data untuk mendapatkan pandangan yang berbeda mengenai situasi dalam studi tunggal. Triangulasi sumber data ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil data atau dokumen-dokumen terkait, observasi, dan juga membandingkan hasil wawancara antara informan 1, 2, 3, dst. Adapun beberapa metode dan sumber perolehan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Data atau dokumen

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari *website*, berita komunitas Betawi dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan, jurnal, serta jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui secara terperinci mengenai pelayanan publik

berbasis kawasan budaya sehingga ketika melakukan penelitian peneliti akan mengetahui secara pasti topik yang ditelitinya.

2. Observasi

Observasi yang dapat dikatakan sebagai proses pengamatan yang dilakukan secara sistematis, observasi ini tidak hanya sekedar melihat atau mengamati tetapi juga peneliti harus dapat menggambarkan kondisi fenomena penelitian dengan menggunakan panca-indranya dengan penggambaran hasil yang dapat berupa foto ataupun tulisan mengenai segala sesuatu yang kini tengah terjadi. Pengambilan data menggunakan observasi dipilih guna sebagai data pendukung penelitian, dimana dengan observasi peneliti dalam mengamati secara langsung bagaimana proses pelayanan tengah berjalan.

3. Hasil Wawancara beberapa informan

Adapun hasil wawancara ini penting dilakukan guna memperoleh data dari informan yang mengalami, merasakan dan memberikan pelayanan publik itu sendiri. Berikut adalah informan-informan yang hasil wawancaranya di bandingkan untuk ditarik kesimpulan:

a. Informan 1 (Ketua Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Setu Babakan)

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap Ketua atau pemimpin sekaligus pegawai dan petugas di sekitar perkampungan budaya Betawi Setu Babakan yang secara langsung mengembangkan dan melaksanakan proses revitalisasi kawasan. Informan 1 ini dipilih

karena informan inilah yang secara langsung mengetahui bagaimana alur dan proses pengajuan revitalisasi serta tujuannya.

b. Informan 2 (Pengunjung kawasan budaya)

Dalam penelitian ini perlu dilakukan wawancara terhadap informan yang secara langsung menerima pelayanan wisata budaya yang secara langsung menjadi penilaian dari revitalisasi yang dilakukan. Konsumen disini memiliki peran penting dalam memberikan informasi terkait dengan bagaimana pelayanan yang mereka terima dan efektifitas pelayanan terhadap indikasi fraud atau kegagalan kebijakan.

c. Informan 3 (Masyarakat sekitar kawasan budaya)

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan informan masyarakat asli sekitar kawasan perkampungan. Masyarakat asli ini merupakan suku Betawi yang bertempat tinggal sejak dibangunnya kawasan wisata hingga saat ini dilakukan kebijakan revitalisasi.